

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah Perang Sipil, patronase politik telah dikurangi ke tingkat yang dipertahankan sampai Perang Dunia Kedua. Dalam hal kegiatan pemerintah, patronase adalah hal biasa. Ketika seorang kandidat partai politik memenangkan pemilihan, pejabat yang baru terpilih memiliki wewenang untuk mengangkat sejumlah orang ke posisi di pemerintahan atau mempekerjakan karyawan baru untuk bekerja di organisasi. Inilah inti dari sistem patronase dalam hal pengangkatan orang untuk menduduki jabatan dalam organisasi pemerintahan. Sebuah fenomena signifikan dalam teater perebutan kekuasaan, patronase telah berkembang menjadi taktik mobilisasi pemilih yang tidak hanya berlaku untuk pemilu skala besar, tetapi juga mulai menyusup ke pemilu di tingkat akar rumput. Potret ini terlihat dari maraknya praktik politik uang di setiap penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemilu di tingkat nasional, regional, dan lokal hingga pemilu di semua tingkat pemerintahan. Apalagi, dengan berjalannya kebijakan dana desa untuk infrastruktur, pintu patronase telah dibuka lebar-lebar sejak lama. Karena patronase memerlukan investasi sumber daya keuangan yang signifikan (Fathudin, 2020).

Infrastruktur merupakan komponen penting dalam memastikan keberlanjutan masyarakat, khususnya di tingkat lokal, dan sangat penting di semua tingkat pemerintahan. Beberapa desa mulai dapat memanfaatkan pendapatan ini untuk kepentingan masyarakat dan keluarga mereka sendiri. Dapat diketahui bahwa sejumlah desa dapat mengadopsi cara-cara inovatif untuk memaksimalkan penggunaan uang tersebut, terutama di bidang pembangunan desa, di mana ide-ide dapat ditransfer dari pejabat pemerintah ke penduduk setempat. Hal ini membuat tidak jarang ditemui permasalahan yang menyangkut desain anggaran desa, di

antaranya adalah inkonsistensi dalam alokasi keuangan desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Andhika, 2017).

Penatausahaan dana desa harus dilihat melalui prisma hubungan patronase yang ada dalam proses politik. Dalam pengembangan desain infrastruktur desa, seringkali ditemukan berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan dalam proses revitalisasi jalan, fasilitas, dan kebutuhan masyarakat lainnya yang harus dibenahi. Untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, diperlukan keseimbangan antara berbagai sektor di wilayah tersebut. Tidak lain adalah pertanyaan apakah infrastruktur itu dibutuhkan dan patut mendapat perhatian dari berbagai otoritas di bidangnya masing-masing. Infrastruktur berfungsi untuk mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi serta memperluas akses terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah. Di tingkat lokal, ada berbagai elemen yang berkontribusi pada kelangsungan hidup pemerintah daerah dalam jangka panjang, salah satunya adalah masyarakat, serta aktor dengan sumber keuangan dan tokoh agama yang lebih besar. Mayoritas pejabat yang mengisi posisi pimpinan diambil dari jajaran daerah sendiri (Sukmajati, 2013).

Hubungan kekerabatan, hubungan saudara, hingga hubungan politik dapat menciptakan suatu sistem pada pemerintahan yang dipimpinnya. Di berbagai desa banyak sekali dijumpai fenomena yang menunjukkan soal hubungan politik yang kental akan kekerabatan. Seperti fenomena hubungan patronase yang menunjukkan pola hubungan kekerabatan antara penguasa politik dengan non politik dengan massanya. Adanya pola patronase sering diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang demi mendapatkan kekuasaan dalam waktu tertentu saja atau bisa diibaratkan masa kontestasi politik, karena adanya jaringan yang bersifat sementara atau pada momen tertentu (Aspinall & Sukmajati, Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme, 2015).

Salah satu contoh dalam dinamika politik yang ada di desa ialah proses politik yang begitu kental akan hubungan kekerabatan. Tidak jauh disitu proses terbentuknya suatu kebijakan untuk merumuskan suatu alokasi dana desa tentu di nahkodai oleh kepala desa, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tentunya hal seperti ini tidak asing bagi berbagai kalangan, jika di desa masih

banyak para aktor yang memiliki sumber daya lebih, baik berupa material hingga social dan politik. Melihat hubungan di desa yang mendahulukan kekerabatan tidak sedikit pula pejabat-pejabat desa ataupun individu yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan kelompoknya. Salah satu contohnya ialah dalam mengalokasikan dana desa untuk infrastruktur jalan yang kurang merata. Banyak jalan-jalan desa yang kurang mendukung untuk akses masyarakatnya dalam menunjang sumber daya yang ada (Mukhlisin, 2021).

Praktik patronase dan dinamika politik dalam desa menarik untuk dapat dikaji. Hans Antlov, dalam buku negara dalam desa menjelaskan bahwa bagaimana terjadinya proses keterlibatan pemerintah pusat melalui orang-orang kepercayaan yang mengisi di kursi-kursi tertentu, baik dari tingkat kabupaten, hingga desa. Kursi jabatan itu yang mengisi sering disebut sebagai tritunggal desa (babinsa, bintara, dan kepala desa). Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa proses pengambilan keputusan fatal baik terkait rancangan anggaran hingga pengangkatan pejabat pemerintah desa harus melewati atau dipustuskan oleh tritunggal desa (babinsa, bintara, dan kepala desa) sebelum nantinya keputusan tersebut disahkan (Antlov, 2002).

RAPBDes (rancangan anggaran pembangunan dan belanja desa) merupakan ujung agenda belanja desa untuk keperluan masyarakat yang makmur. Penyelewengan dana desa yang juga dapat menjadi awalan dalam mengidentifikasi pola hubungan seperti apa yang bisa menyebabkan penyelewengan dana desa tersebut. Serta fenomena akuntabilitas dan transparansi anggaran yang juga dapat menunjukkan bagaimana pola hubungan itu dapat dilihat dengan pemerintah desa melibatkan partisipasi masyarakat dalam masalah penganggaran biaya pembangunan dan perencanaan dalam infrastruktur desa. Pengalokasian dan pembangunan jalan hingga infrastruktur pada dasarnya dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan terkait. Tentunya rancangan belanja desa hingga rancangan pembangunan harus sesuai pengimplementasian dengan RAPBDes (rancangan anggaran pembangunan dan belanja desa) yang tertulis pada masing-masing daerahnya. Dalam merumuskan, Hal serupa ini seringkali dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan para pejabat lokal ataupun individu yang memiliki sumber daya lebih di daerahnya. Ditingkat desa sering menjumpai

bahwa keterlibatan antara masyarakat dengan pejabat desa kurang aktif. Aktor yang memiliki hubungan tersendiri tentu terlibat untuk merumuskan RAPBDes (Rizal, Fitri, and Rantika, 2019). Kurangnya keikutsertaan masyarakat disini membuat ketimpangan yang terjadi pada tiap-tiap desa. Seperti ini dapat menjadi batu loncatan bahwa kurangnya pemerataan infrastruktur hingga pembangunan jalan pada tingkat desa. Keterlibatan antara pejabat pemerintahan desa atau aktor yang membuat suatu hubungan tersendiri antara individu tau kelompok lain dapat didasari oleh janji ataupun komitmen belaka oleh aktor politik untuk mengisi kebutuhan dari individu tersebut. Kepala desa memiliki peran penting untuk menginisiasi masyarakatnya dan bertanggung jawab penuh atas apa yang sedang berjalan pada daerahnya. Hal seperti ini sudah merupakan kewajiban dan harus memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Melihat kondisi ketidaksetaraan dalam pembangunan jalan dapat membuat kebanyakan masyarakat ragu terhadap kepemimpinan pejabat desa (Ayu, Siahainenina, and Kudubun, 2020).

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003). Secara garis besar pengertian desa adalah suatu wilayah pemukiman yang terdapat satu kesatuan masyarakat hukum serta mempunyai batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur berlangsungnya urusan pemerintahan desa itu sendiri. Dinamika politik di desa menghadirkan berbagai fenomena yang di antaranya banyak mengarah pada patronase. Memang dalam hal ini patronase juga merupakan sebuah konsep untuk membuat jaringan, dimana orang yang memiliki legitimasi kuat mencari klien untuk sebuah kepentingannya, sedangkan klien juga memanfaatkan hal ini untuk kepentingan jabatan dalam sebuah struktur yang bersifat pemerintahan atau dengan kepentingan pribadi masing-masing individu. Dalam desa biasanya digambarkan dengan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki legitimasi, kewenangan dan kekuasaan lebih pada masyarakat biasa. Legitimasi, kewenangan dan kekuasaan tersebut biasanya mereka dapat karena kekayaan, ilmunya, ternama ataupun secara demokratis memang menjadi pemimpin di pemerintahan desa tersebut (Tilome, Agustang, and Agustang, 2021). Patron sendiri menjadi istilah untuk orang – orang

atau individu yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia, dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam arti yang paling umum, patron menunjuk pada sekelompok orang yang didalam masyarakat menempati kedudukan-kedudukan tinggi. Dari pengertian di atas kita dapat memahami patron adalah orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan politik yang sangat tinggi terhadap orang atau kelompok lain. Dalam masyarakat kita mengenal adanya patron politik dan patron non politik. Patron politik merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) yang dipilih dengan proses politik yang demokratis. Jika dalam konteks politik desa berupa para pejabat yang bekerja di kantor pemerintahan seperti Kepala Desa BPD, Sekdes dan perangkat-perangkatnya. Sedangkan patron non politik merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan memiliki pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat (Nurhasim, 2005).

Hubungan patron klien suatu desa bisa diidentifikasi dari bagaimana patron mengambil kebijakan dan keputusan bagi masyarakatnya. Karena dalam mengambil keputusan dan kebijakan, tentunya patron juga memiliki pertimbangan dan prosedur yang biasanya disesuaikan dengan kepentingan patron sendiri atau untuk kemsalahan masyarakat desa. Dalam mengambil keputusan dan kebijakan bisa dilihat bagaimana patron menempatkan posisinya di masyarakat, begitu juga posisi masyarakat dalam merespon kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh patron. Dari proses itu, hubungan patron desa dengan masyarakatnya akan terlihat dengan jelas dan terklasifikasi. Seperti salah satunya bagaimana patron desa menjalankan kewajibannya dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran dana desa untuk kepentingan masyarakat desa. Perkembangan keuangan umumnya mempengaruhi pula keuangan desa, mempengaruhi kebijaksanaan serta kegiatan pemerintah desa terutama dibidang pembangunan oleh dan untuk desa, dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat desa (Surningrat, 1985). Dana desa seharusnya memang dikhususkan bagi desa untuk mengalokasikan dananya untuk kepentingan masyarakat, dengan harapan dana desa ini mampu membuat kehidupan masyarakat dan desanya menjadi lebih baik. Artinya penting sekali masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengalokasian dana desa, dari perencanaan sampai eksekusinya. Namun tidak semua desa yang menjalankan kebijakan semacam itu.

Memang ada juga patron desa yang mengikutsertakan masyarakatnya untuk berunding dalam pengalokasian dana desa, namun banyak juga patron yang langsung mengalokasikan dana tersebut tanpa melibatkan masyarakatnya, biasanya untuk sesuatu yang sebenarnya tidaklah hal penting bagi masyarakat desa, artinya masih ada kebutuhan masyarakat yang seharusnya bisa direalisasikan dengan dana desa tersebut (Afrizal et al., 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 menyatakan bahwa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Pasal1 Tentang Desa, Ketentuan Umum, 2005). Dengan Revisi UU mengenai Peraturan Pemerintah Nomo 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal 1 menyatakan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk pada pengertian Undang-Undang desa Sebagai daerah dengan lingkup terkecil yang juga memiliki aturan dan regulasi yang dijamin oleh hukum dan Undang-Undang, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa merupakan jabatan struktural tertinggi yang ada di desa dan pemegang kekuasaan sah yang ada di desa. Kepala desa adalah jabatan yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa setempat di Indonesia. Tata cara pemilihan kepala desa diserahkan kembali kepada satuan hukum dan hak masyarakat tradisional di desanya selama sesuai dengan peraturan pemerintah dan Perda terkait. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Posisi

sentral dan peran yang sangat vital di desa ini membuat posisi kepala desa banyak menjadi rebutan warga-warga desa (Ayu, Siahainenia, and Kudubun, 2020).

Semakin pelik dan setiap politik yang sudah menjabat sebagai kepala desa pasti tidak ingin melepaskan jabatannya begitu saja, karena proses mendapatkannya yang tidak mudah dan biasanya memakan biaya yang tidak sedikit pula. Jika berkaca ke masyarakat modern, memang salah satu sumber kekuasaan yang sangat vital dalam rangka mendapat dan mempertahankan kekuasaan adalah dengan kekayaan. Karena banyak variabel- variabel yang membuat masyarakat desa mau memilih calon tersebut lagi. Tipe kepemimpinan kepala desa menjadi salah satu hal utama dalam rangka mempertahankan dan memelihara kekuasaan di desa. Dalam masyarakat desa yang masih kental tradisionalismenya, syarat-syarat atau komponen-komponen kekuasaan bagi masyarakat tradisional perdesaan pada khususnya mempunyai sifat yang mutlak, antara lain kharisma (Ramdhani, 2019). Kharisma disini berarti memiliki wahyu tuhan atau dewa-dewa, mempunyai wewenang, dalam arti memiliki keturunan sakti/keturunan sah dari si empunya kuasa. Kewibawaan, yang berarti sesuai dengan sifat dan cita-cita ideal masyarakat desa dan kekuasaan yang berarti khusus, yaitu mampu menggerakkan kekuatan fisik dan mengorganisasi banyak orang atas dasar suatu sistem -hal semacam ini yang masih dipegang teguh oleh masyarakat pedesaan di Indonesia, dan masih dapat dilihat dalam pola-pola hubungan patronase. Dalam menjaga hubungan patronase seringkali antara kepala desa dengan masyarakatnya, tentu dapat dilakukan dengan suatu harapan yang di berikan oleh kepala desa dengan para konstituenya. Fenomena seperti ini banyak terjadi di banyak desa – desa (Tilome, Agustang, and Agustang, 2021).

Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto saat ini dipimpin oleh seorang masyarakat biasa, memang semua proses pengambilan keputusan untuk menentukan pemimpin dari salah satu desa harus melalui proses politik. Kepala desa juga merupakan jabatan politik yang memang berkembang dengan sendirinya. Melalui tahap-tahap politik hingga hubungan kekerabatan juga sering dijumpai dalam menentukan struktur yang diduduki oleh masyarakat des aitu sendiri. Dipilih oleh warga desa dan untuk warga desa itu sendiri. Pemegang tongkat kepemimpinan desa bernama Kartono. Dalam menjalankan

kepemimpinannya sebagai kepala desa Kartono dekat dengan masyarakat desa beloh Beliau dikenal dengan kedekatannya dengan pemuda desa yang kental. Desa Beloh sendiri memiliki keberagaman pemuda desa yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Seorang pak Kartono mampu beradaptasi dengan seluruh pemuda yang ada.

Desa beloh memang tergolong desa yang sedang berkembang dari segi ekonomi dan segi infrastrukturnya. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa Kartono memiliki ide – ide untuk kemajuan masyarakat desa beloh, terlihat dari sector jalan pedesaan, system perairan sawah, dan pengembangan sektor sumber daya yang dimiliki oleh desa beloh. Tetapi banyak pula ketimpangan yang bermuara pada pembangunan jalan desa, salah satunya ialah salah satu dusun di beloh terlihat kurang adanya perawatan. Apabila melihat ketiga dusun yang ada di desa beloh memang terlihat timpang, kebanyakan pula beberapa aspek pendukung untuk masyarakat merupakan tempat tinggal pejabat desa hingga, masyarakat yang memiliki sumber daya lebih di desa beloh. Penulis menemukan fakta bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat secara merata. Hal ini dapat didasari dengan kedekatan Kartono dengan masyarakat yang memiliki peran vital dalam desa tersebut seperti tokoh agama, pemilik sumber daya, ataupun pejabat desa.

Kartono sebagai pemegang tongkat kepemimpinan tentunya bertanggung jawab atas semua kemajuan yang berada di wilayah desa beloh. Di samping itu “*carik*” (seketaris desa) desa beloh merupakan pemuda desa yang sangat aktif dengan organisasi-organisasi yang ada di desa. Desa beloh tidak jauh dengan para patron yang memiliki tanah luas disana, karena memang mayoritas masyarakat desa beloh memiliki usaha di bidang pertanian. Penulis hendak mengidentifikasi bagaimana pola patronase Kartono sebagai kepala desa beloh selama masa pemerintahannya. Tidak pendek disitu penulis dapat mengetahui bagaimana kartono dapat melancarkan urusan-urusan pembangunan desa seperti akses jalan desa, dimana jalan desa masih terkesan timpang dengan dusun-dusun yang ada. Mayoritas akses jalan yang bagus ialah akses jalan yang berada pada wilayah kediaman pak kartono dan pengusaha-pengusaha besar.

Dari fenomena seperti itu dapat dilihat bagaimana hubungan antara Kartono dengan masyarakatnya dalam pengalokasian dana desa untuk

implementasi pembangunan jalan demi kesejahteraan masyarakat desa tersebut, dari situ tentunya pasti ada proses yang perlu diamati dalam hubungan patron dengan masyarakatnya. Berangkat dari masalah tersebut, dapat mencoba untuk mencari tahu hubungan patronase yang di jalankan oleh Kartono sebagai kepala desa, dan ada tidaknya keterlibatan masyarakat dalam peranannya mengambil keputusan mengenai dana desa. Selain mencari tahu ada tidaknya peranan masyarakat, hubungan patronase seorang kepala desa beloh dapat mengarah kepada patron yang berkuasa di desa beloh dan memiliki hubungan seperti apa dengan pejabat desa ataupun dengan Kartono. Lalu dengan hal itu bisa dilihat juga bagaimana hubungan kekerabatan patron desa dengan Kepala Desa. Serta bisa menjelaskan hubungan antara patron dengan massa lewat keterbukaan dalam publikasi dan pertanggungjawaban pengalokasian dana desa kepada masyarakat. Selanjutnya, dari itu semua akan tahu bagaimana hubungan patronase yang terepresntasikan melalui berbagai proses keterlibatan masyarakat desa dengan patron desa dalam menentukan pengalokasian RAPBDes (rancangan anggaran pembangunan dan belanja desa) pada pembangunan jalan. Dengan pendekatan patronase melalui pengamatan atas fenomena di atas, dapat pula menganalisis berbagai peristiwa yang beragam dalam konteks hubungan patronase kepala desa dengan masyarakat di pedesaan. Sehingga mampu mengidentifikasi bagaimana pola hubungan patronase yang ada di desa tersebut dengan tidak meninggalkan ciri khas politik desa yang memiliki struktur pemerintahan yang sederhana dan masih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan dan tradisi lokal (Pradana, 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah berguna untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian. Agar dapat memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat tercapai sasaran yang jelas sehingga dapat tercapai dan tujuan yang dipilih. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa sebagai berikut:

1. Bagaimana pola hubungan patronase di desa Beloh?
2. Bagaimana Relasi Kuasa di Desa Beloh dalam proses pembuatan dan pelaksanaan APBDesa?
3. Bagaimana Kepala Desa menguatkan jaringan patronase politiknya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pola hubungan patronase di Desa Beloh
2. Mengetahui peran serta patron dalam proses pembuatan dan pelaksanaan RAPB (Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja) di Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.
3. Mengetahui Bagaimana praktek patronase yang di terapkan Kepala Desa Beloh (Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja) Desa Beloh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a) Untuk mengembangkan kemampuan analisis melihat fenomena hubungan Patronase Kepala Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto
- b) Untuk memberikan gambaran peneliti seputar pola hubungan Patronase desa dengan masyarakat dalam pembuatan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat desa.

2. Bagi Kalangan Mahasiswa

- a) Sebagai referensi terkait politik di desa dengan pendekatan hubungan Patronase.
- b) Sebagai referensi mengetahui pola hubungan patronadesa di desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan masyarakatnya.

3. Bagi Kalangan Masyarakat

- a) Sebagai pembelajaran bagi masyarakat mengenai analisis politik di desa dengan pendekatan hubungan Patronase.
- b) Sebagai informasi mengenai posisi patronegan masyarakat dalam kehidupan desa, melalui sistem politik pemerintahan desa sebagai *input*.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 *Local Strongman*

Kemunculan *local strongman* bermula pasca reformasi rezim Soeharto, tentunya hal ini tidak memunculkan lahirnya demokrasi yang di harapkan berbagai kalangan. Pergeseran kekuasaan dari sentralisme ke desentralisasi pasca reformasi hal ini memunculkan banyak problematika, salah satunya melahirkan kekuasaan kecil di Indonesia dalam lingkup politik lokal. Fenomena politik era reformasi menggambarkan situasi perbanditan seperti yang dijelaskan oleh Mancur Olson, yang mana kekuasaan politik maupun ekonomi mengalir dari bandit besar (*strationaly bandits*) menuju bandit kecil (*roving bandits*). Fenomena politik semacam ini disebut *local strongman* (orang kuat lokal) dan predator oleh Vedi Hadiz (Suaib & Zuhada, 2015)

Fenomena *local strongman* menjamur ketika era reformasi bergulir. Sesosok (orang kuat lokal) mulai berkembang semenjak penyerahan kewenangan dari pemerintah kepada daerah (desentralisasi). Hal ini jarang ditemui di era sentralisasi, dikarenakan pemerintah dikelola secara terpusat. Desentralisasi di gunakan oleh segilintir polit lokal guna membangun oligarki dan ekonomi, dengan cara ini dapat melahirkan orang-orang kuat di tingkat lokal (Handoko, Darmansyah, and Syofian, 2020).

1.5.2 Politik Uang

Praktik patronase didasari oleh bagaimana mereka meyakinkan para jaringan, pemilih, maupun organisasi untuk melancarkan dukungan elektoral. Strategi yang gunakan tidak hanya berkutik seputar bagaimana uang itu digunakan, namun banyak aspek baik secara strategi program, kharisma hingga identitas yang di miliki oleh kandidat. Patronase tidak jauh dengan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan ekonomi lainnya, dengan kata lain patronase tidak hanya berkutat kepada

pemberian jasa ataupun keuntungan ekonomi hingga sosial saja, melainkan praktik politik uang tentu saja digunakan untuk didistribusikan oleh aktor-aktor yang berperan (Rizal, Fitri, and Rantika, 2019).

Tidak sedikit para aktor atau politisi mendistribusikan keuntungan yang diperuntukan individu (misal, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok (misal, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah desa). Merujuk pada Edward Aspinall, patronase juga bisa berupa uang tunai ataupun barang yang di salurkan kepada pemilih atau konstituen dengan dana pribadi nya. Pemerintah pusat juga memberikan biaya dari dana public, disalurkan kepada pemegang otonomi di tingkat lokal (proyek-proyek *pork barrel*). Fenomena seperti ini seringkali disebut sebagai cara kerja dari praktik patronase, tidak sedikit seorang legislator yang hanya tertarik terhadap proses-proses penggaaran. Pada kasus ini seorang pemegang kekuasaan dalam legislator mengharapkan sebuah akses-akses untuk program social, hingga proyek-proyek pembangunan yang dapat memberikan keuntungan politik baginya (Pahlevi and Amrurrobi, 2020).

Selain fenomena diatas barang-barang kelompok (*club goods*), merupakan Sebagian dari praktik patronase. Definisi ini muncul ketika pemberian keuntungan lebih kepada kelompok sosial ketimbang bagi keuntungan individual. (Aspinall & Sukmajati, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, 2015) *club goods* dikategorikan dalam dua hal, pertama donasi untuk asosiasi komunitas, kedua untuk komunitas yang berada pada lingkungan-lingkungan tertentu, misal daerah perkotaan dan pedesaan. Melihat pada negara Indonesia terdapat banyak variasi institusi formal dan institusi informal seperti halnya pada tingkatan lokal, contoh kelompok keagamaan, asosiasi pemuda, organisasi wanita, koperasi petan. Hal ini kerap kali di gunakan oleh kandidat atau aktor sebagai kunjungan pada kelompok-kelompok tersebut, tentu kunjungan tersebut memiliki isi yang berupa pemberian barang hingga keuntungan lainnya. Pemberian barang ini tidak lain berupa jenis barang yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan komunitas tersebut, seperti peralatan ibadah, perlengkapan olahraga, maupun peralatan pertanian. Seorang kandidat kerap kali memberikan sumbangan dengan bentuk pembangunan infrastrukturyang

dibutuhkan oleh masyarakat dalam wilayah tersebut, contoh pembangunan jalan, pembangunan jembatan, rumah ibadah, hingga pemberian sumur air untuk desa (Pahlevi and Amrullohi, 2020).

1.5.3 Kepemimpinan

Kepemimpinan itu adalah masalah relasi antara pemimpin dan yang dipimpin. Relasi ini menumbuhkan rasa saling percaya antara kedua komponen. Hal ini kerap kali masih menjadi senjata utama para pemimpin untuk menyongsong sebuah organisasi ataupun sebuah komunitas masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap responden, masalah relasi juga dibutuhkan dalam dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mengelola, hingga menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu, demi mencapai suatu tujuan tertentu (Pasolong, 2021).

Dengan begitu pemimpin itu ada, dan konkrit tujuannya dan etos kerjanya, bila terdapat kelompok atau satu organisasi. Jadi keberadaan pemimpin selalu terlihat di tengah-tengah kelompoknya (anak buah, rakyat, bawahan). Pemimpin hampir selalu menjadi fokus dari semua gerakan, aktivitas, usaha, dan kemajuan menuju pada sebuah *progress* didalam sebuah kelompok masyarakat atau organisasi. Ia juga merupakan agen primer untuk menentukan struktur kelompok atau organisasi yang dibinanya, juga memberikan sebuah motivasi kerja, dan menentukan sasaran bersama yang akan dicapai. Ringkasnya pemimpin merupakan *inisiator, motivator, stimulator*. Sedang kemunculan pemimpin seringkali terjadi banyak cobaan dan tantangan di tengah-tengah masa kepemimpinannya (Seftyono et al., 2016).

Dalam birokrasi manapun selalu ada yang namanya pemimpin. Dimana pemimpin ini bertindak sebagai penjalan roda birokrasi pemerintahan maupun non pemerintahan. Dalam bahasan kali ini pemerintahan desa biasanya hanya bertindak sebagai pelaksana sebagaimana terdapat konstitusi sebelumnya dirancang oleh pemerintah. Melaksanakan, merealisasikan proyek yang direncanakan itu sudah menjadi tugas dari pemerintah desa. Bahkan tidak hanya itu yang menjadi tugas pemerintahan desa, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk turut mensejahterakan masyarakat desa yang sedang dipimpin. Mereka sering memiliki sedikit manfaat bagi penduduk desa. Dengan peraturan desa yang diatur secara

husus, masalah UU 6 tahun 2014 tentang desa menekankan bahwa desa bukan lagi pemerintah negara bagian lokal, tetapi desa sebagai pemerintah komunitas, hibrida antara masyarakat yang mengatur diri sendiri dan pemerintahan mandiri lokal. Undang-undang desa memberi kesan bahwa ada "desa baru", hanya dalam hal peraturan baru, posisi desa dan pola pengelolaan desa baru. Desa dalam perspektif hukum sebelumnya adalah "Desa Lama" (Sunarsi et al., 2020).

Kelompok kepentingan hanya akan dapat memengaruhi keputusan pemerintah apabila kelompok tersebut mendapatkan akses didalam pemerintah. Titik kontak antara kelompok dengan pembuat keputusan merupakan titik akses. Adapun yang dimaksud dengan akses disini adalah kesempatan suatu kelompok untuk mengadakan kontak mempengaruhi pembuat keputusan politik. Berdasarkan uraian diatas, maka teori pluralis ini membantah kebenaran is. Bagi teori pluralis, yang berkuasa atau yang mempunyai pengaruh besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik selalu terdiri atas lebih dari satu kekuatan politik dan bahwa kekuatan-kekuatan politik itu tidak semuanya mempunyai kekuasaan yang bersifat ekonomi. Tipe Populis Asumsi yang mendasari tipe ini adalah demokrasi, yaitu bahwa partisipasi individu menjadi keharusan dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam kenyataan yang memegang peranan pemimpin menentukan dalam perjuangan sekelompok acap kali justru pemimpin-pemimpin kelompok tadi. Oleh karena itu, yang menentukan atau yang mempengaruhi pembuat dan pelaksanaan keputusan politik adalah sekelompok kecil pemimpin kelompok kepentingan tersebut. Sekelompok pemimpin kelompok politik ini dapat dikategorikan sebagai patronpolitik (Sunarsi et al., 2020). Walaupun, harus diakui bahwa pemimpin kelompok politik itu berasal dan dipilih oleh para anggotanya, sehingga para pemimpin atau patronitu akan berorientasi kepada para anggotanya. Kelemahan tipe is terletak pada ekstrimisitasnya. Orang yang memerintah memang selalu dalam jumlah yang kecil, akan tetapi berasal dari manakah orang yang memerintah. Pihak yang memerintah umumnya dipilih oleh rakyat melalui prosedur demokrasi setidaknya-tidaknya di negara yang menerapkan sistem demokrasi.

Masyarakat itu dinamis sifatnya dan pasti akan mengalami perubahan. Teori kepemimpinan adalah penggenralisasian satu seri perilaku pemimpin beserta

konsep-konsep kepemimpinannya. Sedangkan pemimpin sendiri ialah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu. Sehingga memunculkan kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain (Lamangida et al., 2017). Tipe dan gaya kepemimpinan. Pemimpin mempunyai berbagai karakteristik, sifat, kebiasaan dan lain-lain. Sehingga hal ini yang membedakan dengan orang lain. Tipe pemimpin dan wataknya ditentukan atas tiga pilar dasar, yaitu:

- a) Berorientasikan tugas (*task orientation*)
 - b) Berorientasikan hubungan kerja (*relationship orientation*)
 - c) Berorientasikan hasil yang efektif (*effectiveness orientation*)
- (Kartono, 2009)

Kewenangan lokal di tingkat desa adalah otoritas untuk melindungi kepentingan masyarakat desa yang dikelola oleh desa atau yang dapat dan dapat dilakukan oleh desa atau yang muncul sebagai akibat dari pengembangan praktik desa dan masyarakat desa, termasuk tambatan kapal, mengatur dan mengelola pasar desa, resor umum, saluran irigasi. Perbaikan lingkungan, stasiun layanan terintegrasi, studio seni dan pembelajaran, serta perpustakaan desa, dermaga desa dan jalan desa. Selain itu, undang-undang desa juga menetapkan otoritas lokal di tingkat desa, yang mencakup bidang administrasi desa, pengembangan desa, masyarakat desa, dan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal dan adat istiadat desa (Sunarsi et al., 2020).

1.5.4 Relasi Kuasa

Relasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar individu. Menurut Robert Dahl relasi kuasa diartikan sebagai hubungan antara suatu kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Robert Dahl mengemukakan bahwa kekuasaan sendiri adalah kemampuan seorang petinggi jabatan penting yang dapat mempengaruhi untuk menentang ataupun bisa juga untuk mendukung individu atau kelompok lainnya. Menurut Robert Dahl kekuasaan harus di sebar luaskan pada berbagai elemen kelompok kepentingan, itu bertujuan untuk tidak satu pun kelompok bisa mengklaim sebagai yang dianggap paling mewakili rakyat secara keseluruhan. Angus Stewart kekuasaan yang hadir dalam bentuk dominasi sesuatu atau seseorang. (Aristianto, Suharno, & Tullus, 2016).

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Patronase

Mempertahankan sebuah jabatan penting dalam struktur desa tidaklah mudah. Dalam setiap dinamika yang dialami oleh seorang individu dalam memegang kekuasaan penting yang ada di desa diperlukan sebuah cara masing-masing, antara lain adalah patronase. Dalam arti patronase adalah sebuah cara untuk pihak patron yang memiliki kekuasaan baik dalam segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia kepada pihak klien sebagai individu yang bergantung kepada patron. Patronase juga erat kaitannya dengan klientelisme, tidak lain klientelisme dapat membentuk jaringan yang luas di dalamnya (Sukmajati, 2013).

James Scott (1972) menjelaskan patronase dalam jurnal *Patron – Client Politics and Political Change in South East Asia*. Scott menjabarkan adanya tiga ciri yang membedakan hubungan patronase dengan hubungan-hubungan lain. Pertama adalah ketidaksetaraan, kedua keharusan bertemu secara tatap muka (*face to face*), dan ketiga tingkat kemudahan dalam hubunngan mereka. Ketiga ciri ini harus dilaksanakan dengan sempurna karena erat kaitannya dengan usaha patron politik lokal mencari dukungan serta menjaga stabilitas politik. (Scott, 1972) Suatu komunitas dalam suatu masyarakat tentunya tidak dapat lepas dari adanya suatu hubungan sosial. Tentunya dalam hubungan sosial tersebut terdapat beberapa faktor. Social, politik maupun ekonomi. Dalam hubungan sosial tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari pola hubungan yang saling menguntungkan antara kekuasaan, kepemimpinan, dan stratifikasi atau tingkatan dalam masyarakat. Struktur masyarakat di dalamnya jelas menjadi suatu indikator dari tingkat keberhasilan jalinan hubungan yang nantinya akan terbentuk (Handoko, Darmansyah, and Syofian, 2020).

Potret bagaimana hubungan antara tuan tanah dan petani kecil di banyak negara di Asia Tenggara dilukiskan oleh James Scott, seorang peneliti yang memberikan banyak model bagaimana interaksi antara pemilik dan politisi dihasilkan. Scott percaya bahwa para petani di seluruh wilayah ini bekerja untuk pemilik tanah mereka, memberi mereka layanan dan tenaga kerja sebagai imbalan atas perlindungan dan dukungan ketika mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Ketika klien masuk ke jenis hubungan perdagangan ini, mereka mencari

jaminan keamanan di lingkungan yang keras dan tidak pasti seperti kehidupan. Ketika pemilihan diadakan dan klien-klien ini mulai tinggal di desa, mereka mendapatkan sumber politik baru karena mereka hanya mempengaruhi nasib kandidat untuk posisi yang dia kejar dengan memberikan atau menahan suara mereka (Sukmajati, 2013).

James Scott menyatakan bahwa patronase adalah sebagai pola hubungan patron-client. Dalam hubungan patronase terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau hubungan timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pihak patron biasanya memiliki kekuasaan, kedudukan, jabatan, perlindungan atau materi berupa kekayaan, tanah dan uang. Sementara itu klien hanya memiliki sumber daya berupa tenaga dan loyalitas bisa saja dalam hubungan patronage terdapat middleman atau brooker yaitu orang yang menjadi perantara patron dan client. Hubungan-hubungan yang terjadi antara patron-klien terjadi diantara para pelaku yang tidak sama, dengan kata lain terjadinya ketimpangan. Hubungan ini memiliki jangka waktu yang lebih singkat serta kurang mendatangkan perasaan terikat yang luas, dan ketimbal balikan itu ada tetapi lebih terbatas lingkungannya. Persatuan patron klien lebih oportunitis, patron menurut para klien diperuntukkan mempertinggi ukuran dan keswasembada rombongan pengiringnya. Dan ia memberikan perhatian secukupnya kepada keterlarutan minat masa kini sebagai ganti mewarisi para pengikut ayahnya atau kakeknya semata-mata karena hubungan demikian terdapat pada generasi terdahulu. Patronase berorientasi pada masa kini dan masa lampau, serta tidak mendefinisikan hubungan individu dengan generasi-generasi masa lalu dan dengan seluruh masyarakat yang mencakup segalanya. Hubungan patron-klien dengan penekannya yang lebih besar atas kualitas hubungan yang bersifat membantu menambah ciri-ciri yang dicapai (*achieve characteristic*) si patron (Kurniawan and Hermawan, 2019).

Konsep dalam membahas hubungan patron-klien didefinisikan oleh Scott sebagai jenis hubungan yang terjadi antara dua orang, paling sering melibatkan instrumental, di mana seseorang dalam posisi sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau manfaat, atau keduanya, bagi orang lain. Konsep ini menggambarkan bahwa klien dari status sosial yang lebih rendah yang, pada

gilirannya, membalas peran dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, serta layanan pribadi, kepada patron sebagai imbalannya. Dalam konsep hubungan patron ini, menurut Scott, dipengaruhi oleh setidaknya tiga keadaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertama dan terpenting, ada variasi yang signifikan dalam kepemilikan kekayaan, status sosial, dan pengaruh politik. Seorang pelindung biasanya dipilih berdasarkan kekuatan dan kemampuan untuk mendapatkan posisi dan pangkat, bukan berdasarkan warisan, menurut tradisi yang berlaku.
- 2) Poin kedua adalah bahwa tidak ada struktur untuk memastikan keamanan individu, terlepas dari status sosial atau kekayaan finansial. Hubungan patronase digunakan sebagai mekanisme atau teknik untuk mendapatkan keamanan pribadi ketika keamanan seseorang terancam dan kontrol masyarakat tidak lagi dapat diandalkan sebagai titik acuan. Dalam lingkungan yang didefinisikan oleh kelangkaan sumber daya, pengejaran kekayaan dan kekuasaan, dan persepsi persaingan sebagai permainan zero-sum, di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak dipahami sebagai kerugian bagi pihak lain, ketidakamanan akan terjadi. Akibatnya, peran hukum, prinsip damai, dan institusi yang kuat secara langsung digantikan oleh pentingnya ikatan pribadi.
- 3) Hal ketiga yang perlu diperhatikan, yang juga merupakan implikasi dari konsep hubungan patronase, adalah titik di mana hubungan darah tidak dapat lagi diandalkan untuk perlindungan dan kemajuan.

Persamaan dan Perbedaan antara Kewibawaan Tradisional dan Patronage (Hubungan Patron-Klien) Kewibawaan tradisional dan patronage memiliki banyak kualitas. Untuk memulai dengan kesamaan-kesamaan, kedua jenis ini merupakan hubungan vertikal, dwitunggal, dan asimetris. Patron atau tokoh kewibawaan tradisional yang berjaya adalah seseorang yang memantapkan dirinya sebagai perantara yang mutlak diperlakukan antara sekelompok yang memiliki beraneka ragam keterampilan yang saling melengkapi. Baik para patron maupun para kewibawaan tradisional berhubungan dengan para pengikut mereka melalui pertukaran yang asimetris. Jadi si pengikut yang tertekan keras secara ekonomi akan memperoleh nafkah dari si pemimpin, tetapi sebagai imbalan ia akan secara

sukarela memberikan tenaganya, hak suaranya dan beberapa khusus bahkan nyawanya sekaligus (Afrizal et al., 2020). Kualitas asimetris hal-hal yang akan dipertukarkan sampai batas tertentu menjadi penyebab mengapa hubungan patron-

klien dan kewibawaan tradisional merupakan persatuan hal-hal yang saling berlawanan, yang mempersatukan “kaum mempunya” dengan “kaum tak mempunya”, kaum yang berpengetahuan dengan kaum yang tak berpengetahuan dan si berkuasa dengan si tak berdaya politik. Hubungan kewibawaan tradisional telah diberkati dengan kualitas yang amat efektif. Sekali hubungan itu telah dimantapkan dengan kokoh, maka si pengikut akan terikat untuk patuh tanpa memandang isi keperluan keuangan permintaan si pemimpin yang segera. Sebaliknya, dalam patronase neraca antara ikatan-ikatan afektif dan yang bersifat membantu secara pasti miring kepada keuntungan yang belakangan (Lamangida, Akbar, and Hasan, 2017).

Hubungan patron klien dalam afiliasi partai di desa merupakan hasil hubungan uang yang terus-terang. Dimana kaum tani miskin semata-mata bergabung dengan partai yang menawarkan harga tertinggi untuk padi mereka. Suatu dalil untuk memperkirakan bahwa afiliasi politik hanya tetap mantap selama pasaran terus dikuasai oleh penawar yang sama. Sang patron hanya mengendalikan klien selama patron yang lebih kaya tidak mencoba mengajukan tawaran yang lebih tinggi ketimbang patron pertama. Kewibawaan tradisional cenderung untuk diwariskan dari generasi ke generasi, sedangkan patron dipilih terutama karena pencapaian-pencapaiannya telah menandainya sebagai seseorang kepada siapa orang yang ingin menempel. Jika seorang secara patut memanfaatkan martabatnya, memelihara kedudukannya sebagai gudang pengetahuan khusus dan terlebih-lebih lagi memenuhi etiket kedudukannya sebagai “bapak”, maka ia akan dipercaya dan diikuti. Pola hubungan yang terjadi di *traditional authority* atau kewibawaan tradisional merupakan sebuah hubungan yang terjadi antara orang yang mempunyai kekuasaan personalitas dengan individu lainnya yang memberikan kepercayaan kepada orang yang berkuasa. Atas dasar hal tersebut orang yang memberikan kepercayaan tersebut tidak mengharapkan adanya sebuah imbalan. Sedangkan dalam hubungan patronage seorang patron yang memiliki sumber daya yang berkecukupan dibandingkan sang klien berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang klien. Akan tetapi sang klien mempunyai kewajiban

untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh sang patron atau dengan kata lain adanya suatu hubungan timbal balik (Sukmajati, 2013).

1.6.2 Kebijakan

Kebijakan yang sering dianggap sebagai acuan yang ditetapkan oleh pihak terkait, merupakan sebuah rangkaian konsep dan asas yang sudah menjadi suatu garis besar dalam rencana ataupun pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, serta menentukan suatu Langkah sebuah pemerintahan ataupun organisasi dalam bertindak. Dalam Bahasa Inggris istilah kebijakan sering kita sebut sebagai *policy*. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dalam definisi kebijakan memang berkaitan dengan solusi maupun penyelesaian dalam sebuah struktur pemerintahan, meskipun memang tidak terlihat maksud dan tujuannya dari pemerintahan maupun organisasinya tidak mudah untuk ditebak. Ketika kebijakan public melibatkan individu yang mempunyai maksud, itu merupakan bagian penting dari definisi sebuah kebijakan (Supit, Nangoi, and Budiarmo, 2017).

Penyusunan kebijakan merupakan suatu langkah yang berusaha untuk membuat aturan untuk kesejahteraan suatu masyarakat. Dalam kebijakan, namun tidak dapat dipisahkan dari keberadaan para pelaku kepentingan yang memegang kekuasaan yang cukup besar dalam masyarakat tersebut. Dalam perencanaan kebijakan tidak mungkin dipisahkan pengaruh politik yang terjadi antara kelompok masyarakat dengan organisasi pemerintah. Dalam perencanaan kebijakan, kelompok masyarakat desa adalah pengelompokan individu yang berhak berpartisipasi, sedangkan pemerintah desa adalah orang yang memegang peran sentral dalam perencanaan kebijakan, atau dapat dikatakan pemerintah desa menyelenggarakan forum perencanaan kebijakan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut juga dengan Musrenbangdes biasa dilakukan bersama untuk membahas kebijakan yang dilaksanakan setahun sekali dan terbuka bagi siapa saja yang berminat untuk berpartisipasi (Malempi, Ogotan, and Dengo,

2019). Dalam forum musrenbangdes, ada rasa persatuan di antara para peserta dalam proses perumusan kebijakan. Sebelum Musrenbangdes, pola penetapan kebijakan perencanaan kebijakan telah selesai dan didistribusikan. Para pelaku kepentingan memegang kekuasaan yang cukup besar dalam perencanaan kebijakan, dan mereka akan berusaha untuk mengambil keuntungan dari proses forum Musrenbangdes. Musrenbangdes menghasilkan APBDes sebagai hasil kerja mereka. Ini dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang kemudian berkolusi untuk memajukan kepentingan mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari interaksi mereka satu sama lain (Mafzatun, Rahman, and Andirfa, 2017).

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan format deskriptif. Metode kualitatif ini diperuntukan kepada fenomena fenomena sedetail mungkin dan sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik (Horison, 2007). Menggunakan format deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan berbagai macam fenomena di lapangan dengan tepat dan akurat.

1.7.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kali ini Mempunyai target fokus untuk mengetahui bagaimanakah hubungan patronase Kepala Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Periode Jabatan 2015 terhadap realisasi pemekaran dan kesejahteraan Desa dalam bidang infrastruktur. Hal ini dapat terlihat apabila ada dukungan elemen-elemen yang lain, mulai dari komunitas hingga kelompok-kelompok yang ada di Desa Beloh. Kelompok pemuda yang paling mendominasi di Desa tersebut. Desa Beloh terdiri dari tiga dusun dimana ketiga dusun itu di nahkodai lebih banyak oleh kelompok pemuda-pemuda desanya. Dalam penelitian ini juga berfokus kepada perwujudan hasil Pilkades ini memang ada campur tangan berbagai pihak. Kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa pun dapat menjawab semua persoalan yang ada, mulai dari jaringan yang di susun oleh Kepala Desa melalui teori patronase. Peran pengusaha maupun patrondesa pun disini juga dapat menjadi jawaban atas semua pertanyaan yang ada. di berbagai dusun terkandung

masing-masing produk unggulan yang akan dikembangkan di Desa Beloh. Penelitian kali ini membahas mengenai adanya kepentingan dalam pemekaran dalam infrastruktur di Desa Beloh kabupaten Mojokerto melalui metode kualitatif.

1.7.3 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan ialah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana dalam penelitian kualitatif deskriptif dapat menjelaskan adanya suatu fenomena dengan lebih cermat dan lebih terarah. Dengan melihat fenomena yang ada kita jadi lebih cermat dalam memahami dan mendalami fenomena yang ada. penelitian ini yang nantinya menggunakan teknik wawancara dengan mengharapkan hasil yang lebih jelas dan spesifik. Selain itu juga tujuan dari penggunaan penelitian kualitatif deskriptif bukan hanya sekedar menjelaskan secara menyeluru tentang suatu masalah yang akan di tani namun juga menjadi sebuah pedoman ketika melaksanakan penelitiandan sejalan dengan pertanyaan penelitian yang sudah diajukan. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan pada rumusan masalah.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber dijadikan ebagai pondasi dalam wawancara. Biasanya orang atau individu yang berkaitan dengan kepentingan meni. Berbagai sumber data hingga informasi nantinya akan digali oleh peneliti kepada subjek. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan Kepala Desa Beloh dan praktek patronasenya maka dibutuhkan juga elemen-elemen pendukungnya. Demi mendapatkan data yang valid dan terpercaya untuk memenuhi penelitian maka dilibatkan juga masyarakat. Peneliti harus memiliki dan membutuhkan responden atau sumber yang turut serta andil dan merasakan fenomena yang ada, serta kaitanya dengan Pilkades. Pertanian dan sektor-sektor lainnya seperti pengusaha dan kelompok pemuda juga dibutuhkan dalam hal ini. Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pihak terkait. Dengan adanya subjek sebagai Subjek dapat mempermudah penelitian ini. Berikut subjek penelitian dalam penelitian ini:

1. Subjek 1: Kartono, Kepala Desa (57 Tahun)

Kartono merupakan Kepala Desa Beloh tahun 2013-sekarang. Kartono berperan penting dalam setiap keputusan yang dibuat dalam pembangunan desa Beloh. Ia Bandar togel di desa Beloh dan orang yang memiliki relasi banyak di luar maupun dalam desa.

2. Subjek 2: Samud, Eks Kepala Desa Beloh

Samud merupakan eks kepala desa Beloh sebelum Kartono. Ia merupakan oposisi pemerintahan Kartono saat ini, dan memberikan informasi tentang pemerintahan desa dengan sudut pandang berbeda.

3. Subjek 3: Syafii, Kaur Umum Pemerintah Desa Beloh

Syafii akrab disapa sebagai Sopii. Orang terkenal di desa Beloh dan merupakan pengusaha pertanian dan perkebunan. Sopii memiliki rumah terbesar di desa Beloh dan merupakan orang terkaya. Sopii juga menjabat sebagai Kepala urusan umum pemerintahan desa sejak 25 tahun terakhir.

4. Subjek 4: Faisal, Sekretaris Desa Beloh 2018-Sekarang

Faisal merupakan sekretaris desa baru dan muda, anak dari haji Sopii. Ia baru lulus kuliah di salah satu kampus di surabaya. Ia bertugas sebagai pengruus segala administrasi desa, salah satunya APBDes dan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Beloh.

5. Subjek 5: Idun, Kepala Dusun Sambisari

Idun merupakan kepala Dusun Sambisari, dan orang yang memiliki relasi banyak di pemerintahan desa. Ia berteman dengan siapa saja meskipun beberapa kali kritis terhadap pemerintah desa era Kartono. Namun, ia masih menjabat sebagai kepala dusun dan tetap melaksanakan tugas-tugasnya.

6. Subjek 6: Mukti, Ketua Karang Taruna 2011-2017

Mukti adalah ketua karang taruna periode 2011-2017 atau saat periode pemerintahan Samud dan Kartono. Ia dikenal sebagai oposisi pemerintahan samud karena beberapa keinginan pemuda yang tak pernah diakomodir oleh Samud. Ia mendukung pemerintahan kartono dan terlibat dalam kesepakatan pembangunan fasilitas olahraga desa Belo

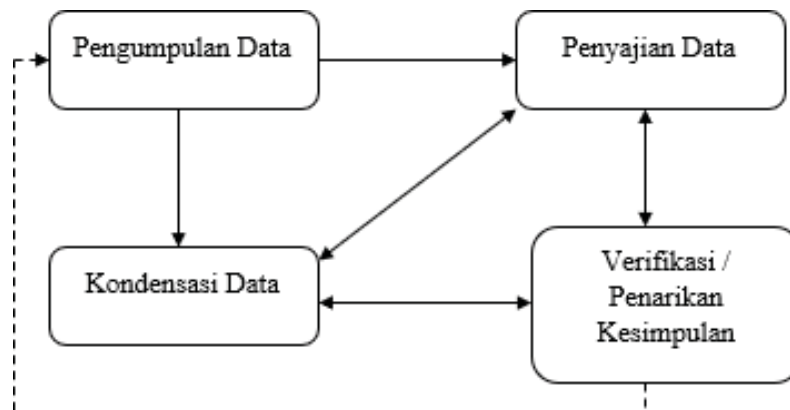
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2019). Wawancara ini dilakukan secara individu kepada masing-masing subjek. Di dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, yaitu pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi bahan mentah. Didukung lagi dengan pengumpulan data dengan melalui media dokumentasi.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder yang sebelumnya diperoleh dari subjek. Tahap selanjutnya setelah mendapatkan itu semua data dianalisis untuk mengidentifikasi dan menjawab fenomena. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana jenis data yang terbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Analisis Model Interaktif

Sumber: Milles, Huberman dan Saldana, 2014

Analisis dimulai dengan perumusan dan penjabaran masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlanjut hingga penulisan hasil kajian. Sebelum turun ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan analisis data pendahuluan atau data primer yang akan digunakan untuk menentukan penekanan penelitian.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya. Pada penelitian ini dilakukan dengan gabungan metode tersebut.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah memilah dan mengelompokkan hasil wawancara serta data-data yang telah didapatkan oleh peneliti berdasarkan fokus yang ada.

3. Penyajian Data

Data yang telah di kondensasi kemudian disatukan dari informasi serta data yang diperoleh dan dikaitkan dengan teori untuk kemudian diambil kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memproses data yang telah disajikan untuk kemudian disederhanakan (Miles et al., 2014)